

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farhana, Yenti. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana, Yenti. (2010). *Perdagangan Orang: Masalah Dan Penanggulangannya Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana, Yenti. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ham*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hatta, Moh. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Liberty.
- Kamal, Muhammad. (2023). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Social Politic Genius.
- Kartono, Kartini. (2013). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, Kartini. (2019). *Kriminologi Dan Kejahatan Transnasional*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nuraeny, Henny. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nurhayati, Yoyon. (2015). *Pencegahan Kejahatan Transnasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pertiwi, Esti Kanti., & Susila, M. Endriyo. (T.T.). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Meninjau Peraturan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: Cv. Strata Persada Academia.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saimima, Ika Dewi Sartika. (2021). *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sleman: Deepublish.

Sinlaeloe, Paul. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jawa Timur: Setara Press.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2020). *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat Indonesia*.

Solihin, M. Agus., Prabowo, Yuwono Tri., Zakaria, Mohammad Roland., & Hayati, Lilis. (2016). *Buku Seri Pendidikan Orang Tua: Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Suhendro, Teguh. (2021). *Penyusunan Buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rangka Membangun Pemahaman Yang Sama Bagi Jaksa Dan Aparat Penegak Hukum Lainnya*. Jakarta: Pusbangkom Pimnas Lan.

Susanti, Heni. (2018). *Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Perkembangannya*. Jakarta: Suluh Media.

Wahiduddin, R. (2013). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafik.

Artikel Dalam Jurnal

- Ammar. (2018). "Pengantar Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum*, 5(1). Daerah, 3(2), 45–58.
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2).
- Darmayanti, Kadek Novi., & Dantes, Kadek Febrinayanti., Et Al. (2025). "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime." *Ganesha Law Review*, 7(1), 1–15. *Hukum Dan Ham*, 4(1), 33–46.
- Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah, 12(1), 60–73.
- Iskandar, Dodi. (2020). "Urgensi Perda Dalam Pencegahan Tppo." *Jurnal Hukum Jaya*, K. K. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.R/2018/Pn Bjb). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 277–295. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 4(2), 95–110.
- Kurniasi, Ririn., & Novita, Novita. (2025). "Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Humaniter*, 4(2), 150–168. *Kebijakan Publik*, 3.
- Kurniawan, Wan Rahmat., Hadiyanto, Alwan., & Ciptono, Ciptono. (2023). "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 101–115.
- Lature, Fransiscus., & Amsori, Amsori. (2025). "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 201–217.
- Mangku, D. G. S. (2020). Urgensi Dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan Ham Regional Asean Di Bawah Aichr. *Jatiswara*, 35(3).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection Of Children In Armed Conflict In The View Of International Humanitarian Law. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, 6(1), 1–10.

- Masyhur. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap
- N. L. P. L. Ayupratiwi. (2022). Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 235–252.
- Nasution, Ramadhany. (2025). "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 33–47.
- Nurhayati, Titi. (2020). "Budaya Hukum Dalam Pencegahan Tppo." *Jurnal Nurhayati, Titi. (2021). "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Tppo Di Tingkat Lokal." Jurnal Sosial Dan Politik*, 6(1), 22–35.
- Nusawakan, Dwight., & Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi. (2025). "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 76–91. *Perlindungan Sosial*, 2(1), 60–74.
- Puanandini, Dewi Asri. (2023). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 17(2), 89–102.
- Puspawati, Ni Kadek. (2022). "Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ham." *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 249–265.
- Putra, I. G. A. A., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).
- Rosyda, Ayu. (2019). "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Rosyda, Luluk. (2019). "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Tppo." Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 14–28.
- Solikin, A. (2021). "Metode Penelitian Hukum Empiris." *Jurnal Ilmu Hukum*, 81.
- Suryani, Mira. (2020). "Pendekatan Berbasis Korban Dalam Penanganan Tppo." *Suryani, Ni Kadek. (2014). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." Jurnal Hukum. Tindak Pidana Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Journal*

- Utama, I. K. A. W., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Praktik Gelap Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Yang Menjadi Sorotan Dunia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).
- Utami, Rizky Dwi. (2025). "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh Kjri Johor Bahru Malaysia." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah*, 4(2), 55–69.
- Utami, Sekar Nursyahidah., & Nasrudin, N. (2024). "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45–58.
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina Tkw Asal Ntt Di Malaysia). *E-Journal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Yudisia, Aulia. (2020). "Sinergi Lintas Sektor Dalam Pencegahan Tppo." *Jurnal Yudisia*, D. (2015). "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Yudisia*, 6(1).
- Yuliantini, N. L. P. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Wna Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 91–100.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection For Women And Children As Victims Of Human Trafficking In Indonesia. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24, 1
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2).
- Yuliantini, Ni Putu Rai. (2020). "Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Pendidikan*

Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 112–123.

Skripsi

Mahadhyaksa, N. A. (2024). *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Buleleng*. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha.

Sudarmayana, I. M. L. (2025). *Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Singaraja)*. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha.

Artikel Dalam Internet

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. (2025). Laporan Tahunan Penanganan Dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. (2025). *Laporan Tahunan Kasus Perdagangan Orang*.

Unit Iv Ppa (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Polres Kabupaten Buleleng. (2025). *Laporan Tahunan Kasus Perdagangan Orang*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban